

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, suatu negara sangat memperhatikan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan sumber daya lainnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk dapat menjadi potensi maupun beban dalam pembangunan suatu negara (Hidayati, Putra, Dewita, dan Framujiastri, 2020). Ketika kuantitas atau jumlah penduduk melampaui kapasitas terhadap fasilitas yang seharusnya dapat memenuhi masyarakatnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kualitas masyarakat itu sendiri maupun kualitas kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Sebagaimana Hidayati, dkk (2020) menegaskan bahwa aspek kependudukan membawa pengaruh besar terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu sangat penting menjaga keseimbangan jumlah penduduk agar dapat merawat dan tidak merusak bumi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih terbelit dengan masalah kependudukan. Menurut Shiffman (2002) program yang paling efektif dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Program Keluarga Berencana (KB). Opini tersebut bukan tanpa alasan, Titisari (2020) berpendapat bahwa dalam perkembangannya, program KB membawa perubahan besar pada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Dibuktikan dari turunnya angka Total Fertility Rate (TFR) nasional sejak tahun 1968 hingga saat ini, serta transformasi norma keluarga menjadi keluarga kecil memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat (Titisari, 2020). Analisis lanjut yang

dilakukan oleh Sujarwoto (2017) dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2006-2014 menunjukkan bahwa transformasi tersebut memberikan efek positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses kerja formal.

Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, pembangunan keluarga adalah salah satu isu penting dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek utama pranata sosial. Kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi dasar bagi keutuhan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan terpecah akan melemahkan fondasi kehidupan bermasyarakat. Penguatan ketahanan keluarga adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa "Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya."

Sejarah mencatat perubahan yang signifikan pada jumlah, karakteristik, dan struktur populasi di Indonesia terjadi sejak tahun 1950an hingga saat ini. Transformasi ini dikaitkan sebagai produk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik abad ke-20 yang identik dengan industrialisasi, pertanian modern, urbanisasi, edukasi, dan nasionalisme (Hull, 2005). Perkembangan KB dan penurunan populasi di Indonesia diceritakan pula oleh Terence Hull dan Valerie Hull (2005), menurut catatan tersebut pada tahun 1950an, Presiden Soerkarno menyatakan bahwa populasi yang besar adalah sebuah sumber daya. Hal itu

demikian didasari oleh ingatan masa lalu tentang konflik dan perang berkepanjangan dan mengakibatkan banyak korban jiwa sehingga populasi merupakan aset yang berharga (Hull, 2005).

Namun demikian, kekhawatiran global mengenai padatnya penduduk dunia pada saat itu menekan negara-negara berkembang yang padat penduduknya untuk membuat suatu kebijakan dalam mengatasi masalah kependudukan. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang saat ini dikenal dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ditetapkan dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 20 Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan seimbang, maka pemerintah menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang diupayakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu dengan memberikan batasan jumlah anak yakni dua untuk setiap keluarga.

Seperti yang telah disebutkan dari beberapa penelitian yang mengakui dengan dibuktikan melalui hasil riset ilmiah bahwa program KB ini merupakan agen dalam *social change* (perubahan sosial) di masyarakat. Karena tidak hanya memberikan dampak luar biasa dalam transformasi sosial bangsa terutama dalam pandangan tentang jumlah anak. Tetapi juga menjamin kesejahteraan hidup serta keselarasan dengan sumber daya lainnya sehingga lebih berkualitas (Titisi, 2020).

Pada rentang tahun 1800-1900 jumlah penduduk Indonesia bertambah tiga kali lipatnya. Sedangkan tahun 1900-2000 terjadi pertambahan penduduk lima kali lipat dari 40,2 juta orang menjadi 205,8 juta orang. Selama rentan 1900-2000, program Keluarga Berencana (KB) berhasil mencegah kelahiran 80 juta orang. Tanpa program KB jumlah penduduk hingga tahun 2000 diprediksi akan mencapai 285 juta orang, ungkap Kepala BKKBN, Dr. Sugiri Syarief, MPA pada acara Studium Generale “Kependudukan dan Program Keluarga Berencana: Peluang dan Tantangan, di Auditorium Institut Pertanian Bogor (Hasriani, 2022).

Keberhasilan atas suatu kebijakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di dalamnya. Sebagaimana partisipasi itu diartikan sebagai keikutsertaan individu atau kelompok untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan bersama (Mawarni, 2021). Begitu pula dengan keberhasilan program KB sangat bergantung pada partisipasi masyarakatnya. Seperti partisipasi masyarakat terhadap program KB di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 70 persen pertahun 2019 (Atmoko, 2019). Angka tersebut masih menjadi fokus pemerintah daerah hingga hari ini. Hal tersebut dipicu oleh tingginya angka pernikahan dini yang berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi. Bahkan pernah disebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan tiang penyangga utama dalam program KB nasional. Mengartikan bahwa kegagalan atau keberhasilan Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pada tingkat nasional (BKKBN, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme pemerintah daerah dan masyarakat Jateng dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas semakin membaik.

Namun, di balik tingginya dukungan masyarakat terhadap program KB yang akan berpengaruh pada tingginya minat partisipasi masyarakat tentu didorong oleh keyakinan masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Bali, mereka tidak menolak program KB karena program tersebut bukan hanya untuk membatasi jumlah anak, tetapi lebih kepada menuntun masyarakatnya hidup sehat dan berkualitas (Titisari, 2020). Menimbang bahwa di Pulau Dewata tersebut terdapat kearifan lokal memiliki “empat anak” maka hal ini bertentangan dengan program KB yang mengkampanyekan “dua anak”. Sehingga dikhawatirkan terjadi penghapusan konsep sistem penamaan Bali di mana eksistensi penyebutan anak ketiga “Nyoman” dan “Ketut” sebagai anak tambahan ditakutkan hilang.

Namun sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjalanan program KB di Indonesia tidak ada larangan dan paksaan untuk dapat memiliki dua anak atau lebih karena akan bertentangan dengan hak reproduksi. Adioetomo (2005) juga menegaskan bahwa program KB bersifat dinamis yang tidak lepas dari dinamika perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian program KB sangat toleransi dengan keunikan seperti yang dimiliki masyarakat Bali tersebut. Bahkan disebutkan bahwa masyarakat Bali lebih toleran terhadap program pemerintah tersebut karena selaras dengan tujuan agama Hindu (Sangging dkk, 2019).

Berdasarkan data tahun 2021, sebanyak 290 PUS mengikuti program KB. Angka tersebut tergolong lebih unggul jika dibandingkan dengan kesembilan gampong lainnya di Kecamatan Banda Baro. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Ulee Nyeue cukup signifikan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Jumlah Pus Berdasarkan Asal Gampong di Kecamatan Banda Baro
Tahun 2021

No	Nama Gampong	Pasangan Usia Subur (PUS)
1	Ulee Nyeue	290
2	Paya Dua	229
3	Cot Jabet	60
4	Paya Bunyot	76
5	Jamuan	286
6	Alu Keurinyai	126
7	Blang Pala	147
8	Sangkelan	172
9	Paya Uleu	75
	Jumlah	1.461

Sumber: Olahan Pribadi berdasarkan data Pendataan Keluarga Berencana 2021

Berdasarkan data jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di berbagai gampong di Kecamatan Banda Baro, terlihat bahwa jumlah PUS bervariasi di tiap wilayah, dengan total keseluruhan mencapai 1.461 pasangan. Gampong dengan jumlah PUS tertinggi adalah Ulee Nyeue (290 pasangan) dan yang aktif mengikuti program KB sebanyak 244 pasangan. Diikuti oleh Jamuan (286 pasangan) dengan jumlah PUS aktif KB sebanyak 180 pasangan. Paya Dua (229 pasangan), yang aktif KB sebanyak 120 pasangan. Sementara itu, jumlah PUS paling rendah terdapat di Cot Jabet (60 pasangan) dengan jumlah PUS ikut KB sebanyak 30 pasangan, dan Paya Uleu (75 pasangan) dengan jumlah PUS ikut KB sebanyak 42 pasangan.

Jika dikaitkan dengan partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), gampong dengan jumlah PUS tertinggi memiliki potensi lebih besar dalam penyuluhan dan penerapan program KB, sementara gampong dengan jumlah PUS lebih rendah mungkin memerlukan pendekatan yang lebih spesifik untuk meningkatkan partisipasi.

Di balik kesuksesan Gampong Ulee Nyeue dalam menerapkan program KB pada masyarakatnya, pastinya ada motivasi tersendiri bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengikuti program tersebut. Maka dari itu, penelitian ini meneliti tentang tanggapan masyarakat terhadap program KB dan apa yang menjadi motifvasi di balik antusiasme PUS mengikuti KB di Gampong Ulee Nyeue.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program KB di Gampong Ulee Nyeue?
2. Apa motivasi Pasangan Usia Subur di Gampong Ulee Nyeue mengikuti program KB?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan masyarakat terhadap program KB di Gampong Ulee Nyeue.
2. Motivasi Pasangan Usia Subur di Gampong Ulee Nyeue mengikuti program KB.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggapan masyarakat Gampong Ulee Nyeue terhadap program KB.
2. Untuk mmenganalisis motivasi Pasangan Usia Subur di Gampong Ulee Nyeue mengikuti program KB.

1.5 Manfaat Penelitian

Lebih lanjut, manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu antropologi kesehatan dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada studi program KB dalam konteks budaya Aceh.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengembangan program keluarga berencana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para petugas kesehatan, khususnya penyuluhan KB.